

## BAB VIII

### PENUTUP

#### 8.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada tiap-tiap variabel input, proses, dan output, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Manajemen Program Keluarga Berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Petugas Fungsional PKB di BKKB Provinsi DKI Jakarta dari segi kuantitas belum mencukupi untuk melaksanakan program KB pada tingkat kelurahan.
2. Anggaran operasional yang dialokasikan untuk pelayanan KB, terutama metode MOP dan MOW, belum cukup memadai jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan target yang ingin dicapai.
3. Alur pendistribusian alat kontrasepsi sudah cukup memadai untuk menunjang pelayanan KB di tiap tingkatan wilayah.
4. Proses perencanaan program KB sudah dilakukan secara *bottom-up*, sehingga memungkinkan program KB yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Pelaksanaan program KB di BKKB Provinsi DKI Jakarta melibatkan banyak sektor terkait, baik sektor pemerintahan maupun sektor luar pemerintahan.

6. Pengendalian dan evaluasi program KB dilakukan berjenjang pada tiap tingkat wilayah sehingga hambatan yang dihadapi lebih cepat ditangani dan pelaksanaan program keluarga berencana dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan.
7. Jumlah peserta KB baru sudah memenuhi target PPM yang ditetapkan. Jumlah peserta KB baru didominasi oleh pengguna kontrasepsi Non MKJP.
8. Jumlah peserta KB aktif belum memenuhi target PPM yang ditetapkan.
9. Metode kontrasepsi jangka panjang yang paling diminati oleh masyarakat adalah metode IUD.
10. Metode kontrasepsi Non MKJP yang paling diminati oleh masyarakat adalah metode suntik hormonal.

## 8.2 Saran

Untuk meningkatkan kualitas program keluarga berencana di BKKB Provinsi DKI Jakarta pada tahun mendatang, maka :

1. Perlu dilakukannya perencanaan kebutuhan petugas lapangan untuk menunjang program keluarga berencana sehingga jumlah petugas dapat sebanding dengan beban kerja yang dihadapi.
2. Perlu ditingkatkannya advokasi terhadap pembuat keputusan berkaitan dengan dukungan anggaran program keluarga berencana.
3. Perlu ditingkatkannya promosi metode kontrasepsi jangka panjang sehingga dapat meningkatkan efektifitas program keluarga berencana di Provinsi DKI Jakarta.